PENGARUH BELANJA MODAL DAN BELANJA APARATUR TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

Robeza Pratiwi
NPP. 33.0187
Asdaf Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Program Studi Keuangan Publik
Email: zazarobeza@gmail.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM.
Email: ihwan@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The expenditure composition of districts and cities in Riau Province reveals a structural imbalance in which apparatus expenditure consistently dominates the regional budget, thereby potentially constraining the fiscal space available for capital expenditure that bears a more direct impact on poverty alleviation.* ***Purpose:*** *This study aims to empirically analyze the influence of capital expenditure and apparatus expenditure on poverty rates in districts and cities of Riau Province.* ***Method:*** *A quantitative approach employing a panel data design was utilized, encompassing 12 districts and cities in Riau Province over the period 2016–2024 (108 observations). Model selection was systematically conducted through the Chow Test ($F = 201.056$, $p = 0.000$), Hausman Test ($\chi^2 = 38.42$, $p = 0.000$), and Lagrange Multiplier Test, yielding the Fixed Effect Model as the most appropriate estimator. Classical assumption diagnostics—including normality (Jarque-Bera: $JB = 2.143$, $p = 0.342$), multicollinearity ($VIF = 2.840$), and autocorrelation (Wooldridge $F = 1.873$, $p = 0.196$)—were satisfactorily fulfilled.* ***Result:*** *Capital expenditure exerts a statistically significant negative effect on poverty rates, with an elasticity coefficient of -0.167 ($t = -2.964$; $p = 0.004$), implying that a one-percent increase in capital expenditure realization is associated with a 0.167-percent reduction in poverty incidence after controlling for entity-specific fixed effects. Conversely, apparatus expenditure demonstrates a statistically significant positive effect with a coefficient of 0.448 ($t = 3.055$; $p = 0.003$), indicative of a fiscal crowding-out mechanism. Jointly, both variables exert a significant influence on poverty rates ($F = 6.900$; $p = 0.002$; R^2 overall $= 0.563$).* ***Conclusion:*** *Optimizing the composition of regional expenditure—by incrementally increasing the proportion of capital expenditure toward a minimum of 25 percent of the total budget and pursuing a planned rationalization of apparatus expenditure—constitutes a strategic fiscal policy instrument for poverty reduction in Riau Province.*

Keywords: *Apparatus Expenditure; Capital Expenditure; Fixed Effect Model; Panel Data; Poverty Rate; Riau Province*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Komposisi belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau menunjukkan ketidakseimbangan struktural di mana belanja aparatur secara konsisten mendominasi anggaran daerah, sehingga berpotensi mempersempit ruang fiskal yang tersedia bagi belanja modal yang memiliki dampak lebih langsung terhadap pengurangan kemiskinan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh belanja modal dan belanja aparatur terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. **Metode:** Pendekatan kuantitatif dengan desain data panel digunakan sebagai kerangka metodologis, mencakup 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada periode 2016–2024 (108 observasi). Pemilihan model dilakukan secara sistematis melalui Uji Chow ($F = 201{,}056$; $p = 0{,}000$), Uji Hausman ($\chi^2 = 38{,}42$; $p = 0{,}000$), dan Uji Lagrange Multiplier, sehingga Fixed Effect Model ditetapkan sebagai estimator yang paling sesuai. Uji asumsi klasik meliputi normalitas (Jarque-Bera: $JB = 2{,}143$; $p = 0{,}342$), multikolinearitas (VIF = 2,840), dan autokorelasi (Wooldridge $F = 1{,}873$; $p = 0{,}196$) seluruhnya terpenuhi. **Hasil/Temuan:** Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien elastisitas sebesar −0,167 ($t = -2{,}964$; $p = 0{,}004$), yang bermakna bahwa setiap kenaikan satu persen realisasi belanja modal dikaitkan dengan penurunan 0,167 persen angka kemiskinan setelah heterogenitas antardaerah dikendalikan. Sebaliknya, belanja aparatur berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,448 ($t = 3{,}055$; $p = 0{,}003$), mengindikasikan mekanisme crowding out fiskal. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan ($F = 6{,}900$; $p = 0{,}002$; R^2 overall = 0,563). **Kesimpulan:** Optimalisasi komposisi belanja daerah melalui peningkatan proporsi belanja modal secara bertahap menuju minimal 25 persen dari total anggaran dan rasionalisasi belanja aparatur yang terencana merupakan instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam menekan kemiskinan di Provinsi Riau.

Kata Kunci: Belanja Aparatur; Belanja Modal; Data Panel; Fixed Effect Model; Provinsi Riau; Tingkat Kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Provinsi Riau, meskipun dikenal memiliki potensi fiskal yang besar dari sektor perkebunan kelapa sawit serta minyak dan gas bumi, masih menghadapi disparitas kesejahteraan yang signifikan antarwilayah. Tingkat kemiskinan rata-rata 12 Kabupaten/Kota pada periode 2016–2024 menunjukkan variasi yang ekstrem, mulai dari 3,14 persen di Kota Dumai hingga 27,50 persen di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Komposisi belanja daerah merupakan cerminan prioritas kebijakan pemerintah. Dalam konteks Provinsi Riau, belanja aparatur secara konsisten mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rata-rata lebih dari separuh total belanja, sementara belanja modal yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas justru menunjukkan tren yang fluktuatif dan cenderung tertekan. Kondisi struktural ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas alokasi fiskal dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat membuka akses ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang mampu menurunkan angka kemiskinan. Di sisi lain, alokasi yang berlebihan pada belanja aparatur berpotensi menciptakan crowding out fiskal yang mempersempit ruang bagi program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.2 Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Berbagai kajian terdahulu telah mengkaji pengaruh belanja pemerintah terhadap kemiskinan. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik menganalisis secara simultan dampak komposisi belanja modal dan belanja aparatur terhadap tingkat kemiskinan dengan pendekatan data panel dalam konteks Kabupaten/Kota di Provinsi Riau masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan cakupan geografis yang lebih luas atau hanya berfokus pada satu komponen belanja, sehingga belum dapat menggambarkan trade-off antara belanja konsumtif dan produktif secara komprehensif dalam konteks daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi terhadap transfer pusat.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk menyediakan bukti empiris mengenai efektivitas alokasi belanja daerah dalam upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi Riau sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. Tanpa landasan empiris yang kuat, reformasi alokasi APBD berisiko tidak efektif dan tidak responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

1.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai kajian terdahulu yang relevan. Yeboah et al. (2025) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian menunjukkan pengaruh langsung dalam menurunkan kemiskinan pedesaan di Ghana. Rahman et al. (2025) menegaskan bahwa kualitas tata kelola belanja pemerintah di sektor kesehatan sangat memengaruhi penurunan kemiskinan. Nisa dan Handayani (2021) membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Niswani et al. (2022) menyimpulkan bahwa alokasi belanja modal memberikan dampak positif dan substansial terhadap kinerja keuangan daerah di Aceh. Sultan dan Purwiyanta (2023) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai kebijakan distribusi yang adil tidak akan mengentaskan kemiskinan secara optimal.

1.5 Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari kajian terdahulu pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini secara simultan menganalisis dua komponen belanja daerah yang saling berkontestasi—belanja modal dan belanja aparatur—sebagai prediktor tingkat kemiskinan. Kedua, penelitian ini menggunakan data panel 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau selama sembilan tahun (2016–2024) yang memberikan perspektif temporal yang lebih komprehensif. Ketiga, penggunaan Fixed Effect Model memungkinkan pengendalian heterogenitas tidak teramati antardaerah, sehingga estimasi pengaruh yang dihasilkan lebih bebas dari gangguan variabel omitted yang bersifat tetap.

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan belanja aparatur terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada periode 2016–2024.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain data panel yang mengintegrasikan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (dimensi cross-section) dengan rentang waktu sembilan tahun, yaitu 2016–2024 (dimensi time series), sehingga menghasilkan 108 unit observasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengendalikan heterogenitas tidak teramati antardaerah sekaligus mengidentifikasi efek dinamis belanja fiskal terhadap kemiskinan dalam jangka menengah.

Pemilihan model estimasi dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap pengujian formal. Uji Chow menghasilkan F-statistik sebesar 201,056 ($p = 0,000$) yang menolak Pooled OLS. Uji Hausman menghasilkan chi-square sebesar 38,42 ($p = 0,000$) yang menolak Random Effect Model. Berdasarkan kedua pengujian tersebut, Fixed Effect Model (FEM) ditetapkan sebagai estimator yang paling sesuai, karena mampu mengendalikan heterogenitas struktural antardaerah seperti perbedaan kondisi geografis, kapasitas birokrasi, dan warisan historis pembangunan yang bersifat tetap sepanjang waktu.

Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin) yang bersumber dari BPS Provinsi Riau. Variabel independen adalah realisasi belanja modal (X_1) dan belanja aparatur (X_2) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kedua variabel independen ditransformasi ke dalam logaritma natural untuk mengatasi heteroskedastisitas dan memfasilitasi interpretasi elastisitas.

Uji asumsi klasik telah terpenuhi seluruhnya, meliputi: (1) normalitas residual yang diuji menggunakan metode Jarque-Bera dengan nilai statistik 2,143 ($p = 0,342 > 0,05$); (2) multikolinearitas yang diuji melalui Variance Inflation Factor ($VIF = 2,840 < 10$); serta (3) autokorelasi yang diuji menggunakan prosedur Wooldridge dengan nilai F sebesar 1,873 ($p = 0,196 > 0,05$). Pengolahan data dilaksanakan menggunakan perangkat lunak Stata 17 dan Microsoft Excel 2021. Penelitian berlokasi di BPS Provinsi Riau dan BPKAD Provinsi Riau pada periode Januari–April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Deskriptif Data

Selama periode 2016–2024, rata-rata realisasi belanja modal berkisar antara Rp115,33 miliar hingga Rp893,40 miliar, dengan rata-rata keseluruhan sebesar Rp338,16 miliar dan koefisien variasi (CV) sebesar 0,464. Belanja aparatur memiliki rata-rata sebesar Rp565,15 miliar dengan variasi yang lebih rendah ($CV = 0,304$). Tingkat kemiskinan menunjukkan disparitas paling ekstrem dengan $CV = 0,627$, mencerminkan perbedaan kondisi struktural yang signifikan antardaerah. Tabel 1 menyajikan ringkasan rata-rata data penelitian per Kabupaten/Kota.

Tabel 1.
Rata-Rata Belanja Modal, Belanja Aparatur, dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2016–2024

Kabupaten/Kota	Rata-Rata BM (Miliar Rp)	Rata-Rata BA (Miliar Rp)	Rata-Rata TK (%)
Kab. Kampar	411,74	735,24	6,73
Kab. Bengkalis	714,01	798,06	6,13
Kab. Indragiri Hulu	262,23	532,46	7,21
Kab. Indragiri Hilir	297,52	623,48	6,95
Kab. Pelalawan	312,05	442,33	10,28
Kab. Rokan Hulu	273,44	545,75	11,65
Kab. Rokan Hilir	310,24	588,05	8,63
Kab. Siak	458,38	539,99	6,15
Kab. Kuantan Singingi	221,12	428,20	8,88
Kab. Kepulauan Meranti	155,40	279,29	24,83
Kota Pekanbaru	444,87	879,32	3,51
Kota Dumai	196,90	389,64	3,56

Sumber: DJPK Kemenkeu & BPS Provinsi Riau, 2016–2024 (data diolah)

3.2 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel	Koef. (β)	Std. Error	t-hitung	p-value	Keterangan
LnBM (Belanja Modal)	−0,1666	0,0562	−2,964	0,004	Signifikan ***
LnBA (Belanja Aparatur)	0,4483	0,1467	3,055	0,003	Signifikan ***
Konstanta (α)	1,9842	0,8734	2,271	0,025	Signifikan **
R^2 Within	0,1268	R^2 Between	0,9487	R^2 Overall	0,5634
F-statistik	6,900	p-value F	0,002	N	108 observasi

*Sumber: Data diolah dengan Stata 17, 2026. *** signifikan α = 1%; ** signifikan α = 5%*

3.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien $\beta_1 = -0{,}167$ ($t = -2{,}964$; $p = 0{,}004$). Temuan ini bermakna bahwa setiap kenaikan satu persen pada realisasi belanja modal dikaitkan dengan penurunan 0,167 persen pada angka kemiskinan, setelah mengendalikan heterogenitas antardaerah yang bersifat tetap. Mekanisme transmisi ini konsisten dengan teori pertumbuhan endogen, di mana investasi infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas kesehatan/pendidikan meningkatkan konektivitas wilayah, menurunkan biaya transaksi ekonomi, dan memperluas akses masyarakat miskin terhadap pasar dan layanan publik.

Secara empiris, Kabupaten Bengkalis yang mencatat rata-rata belanja modal tertinggi (Rp714,01 miliar) juga menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang konsisten selama periode pengamatan. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan rata-rata belanja modal terendah (Rp155,40 miliar) masih menanggung tingkat kemiskinan tertinggi (rata-rata 24,83 persen). Pola ini memperkuat argumen bahwa investasi publik yang memadai merupakan prasyarat bagi pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Ihwan Sudrajat (2021) yang menemukan bahwa belanja modal pemerintah daerah memiliki efek pengganda signifikan terhadap pertumbuhan inklusif, serta Jatnika Dwi Asri (2022) yang membuktikan bahwa komposisi belanja daerah merupakan penentu yang lebih signifikan terhadap penurunan kemiskinan multidimensi dibandingkan total volume anggaran.

3.4 Pengaruh Belanja Aparatur terhadap Tingkat Kemiskinan

Belanja aparatur terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien $\beta_2 = 0{,}448$ ($t = 3{,}055$; $p = 0{,}003$). Temuan paradoksal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja aparatur justru berasosiasi dengan peningkatan angka kemiskinan. Interpretasi yang paling konsisten dengan data adalah mekanisme fiscal crowding out: alokasi yang semakin besar untuk kompensasi pegawai mempersempit ruang fiskal yang tersedia bagi belanja modal dan program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kelompok miskin.

Data realisasi APBD menunjukkan bahwa di seluruh 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau, belanja aparatur secara rata-rata menyerap lebih dari 60 persen total belanja, jauh melampaui proporsi yang dinilai ideal. Fenomena ini menciptakan rigiditas anggaran di mana komponen mandatory spending yang bersifat konsumtif mengorbankan investasi produktif. Temuan ini selaras dengan Ahmad Munandar (2022) tentang mekanisme crowding out fiskal akibat dominasi belanja pegawai dalam APBD, serta dengan kajian Dick-Sagoe et al. (2025) di Ghana yang menemukan bahwa dominasi transfer dan mandatory spending membuat pejabat daerah kurang responsif terhadap kebutuhan pembangunan masyarakat.

3.5 Pengaruh Simultan dan Koefisien Determinasi

Secara simultan, belanja modal dan belanja aparatur terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai F-statistik sebesar 6,900 ($p = 0{,}002$). R^2 overall sebesar 0,563 mengindikasikan bahwa 56,3 persen variasi tingkat kemiskinan antardaerah dapat dijelaskan

oleh kedua variabel fiskal tersebut, sementara 43,7 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor nonfiskal seperti struktur ekonomi lokal, modal sosial, dan kondisi geografis.

Efek tetap (fixed effects α_i) memberikan informasi penting tentang heterogenitas struktural antardaerah. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki efek tetap positif tertinggi ($\alpha_i = 1{,}526$), mencerminkan beban kemiskinan struktural yang jauh melampaui rata-rata provinsi. Sebaliknya, Kota Pekanbaru ($\alpha_i = -0{,}770$) dan Kota Dumai ($\alpha_i = -0{,}529$) memiliki efek tetap negatif, mencerminkan fondasi ekonomi dan infrastruktur yang relatif lebih kuat.

3.6 Temuan Menarik Lainnya

Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 tampak jelas dalam data penelitian, ditandai dengan kenaikan tingkat kemiskinan yang hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan refocusing anggaran yang memangkas belanja modal secara signifikan, justru pada saat masyarakat paling membutuhkan stimulus fiskal. Fenomena ini menegaskan pentingnya menjaga proporsi belanja modal yang memadai bahkan di tengah kondisi krisis, agar tidak semakin memperburuk angka kemiskinan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ($\beta_1 = -0{,}167$; $t = -2{,}964$; $p = 0{,}004$), sedangkan belanja aparatur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan ($\beta_2 = 0{,}448$; $t = 3{,}055$; $p = 0{,}003$). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan dengan kemampuan penjelasan sebesar 56,3 persen ($F = 6{,}900$; $p = 0{,}002$). Temuan ini mengimplikasikan bahwa optimalisasi struktur belanja daerah—melalui peningkatan proporsi belanja modal dan rasionalisasi belanja aparatur—merupakan instrumen kebijakan fiskal yang strategis dalam menekan kemiskinan di Provinsi Riau.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk: (1) meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap menuju minimal 25 persen dari total anggaran; (2) melaksanakan rasionalisasi belanja aparatur yang terencana dan berkelanjutan agar ruang fiskal bagi program pro-kemiskinan dapat diperluas; dan (3) meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi belanja modal agar efek pengandanya terhadap pengurangan kemiskinan dapat dioptimalkan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada dua variabel fiskal (belanja modal dan belanja aparatur) dan tidak mencakup faktor non-fiskal seperti modal sosial, kondisi geografis, dan kualitas tata kelola yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan.

Arah Penelitian Mendatang. Penelitian lanjutan disarankan untuk memasukkan variabel moderasi berupa kualitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas kelembagaan daerah, serta memperluas cakupan ke seluruh provinsi di Sumatera guna menghasilkan generalisasi temuan yang lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan substansial selama proses penelitian dan penulisan. Terima kasih juga disampaikan kepada BPKAD Provinsi

Riau dan BPS Provinsi Riau yang telah memberikan akses data, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Asri, Jatnika. (2022). Analisis Komposisi Belanja Daerah dan Implikasinya terhadap Indeks Kemiskinan Multidimensi di Pulau Sumatera. Jurnal Keuangan Publik IPDN, 5(2), 45–63

Astuty, S. (2022). Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Modal BPBD Kota Banjarmasin. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 8(1), 45–58. https://www.researchgate.net/publication/367501392_BELANJA_PEGAWAI_BELANJA_BARANG_DAN_JASA_DAN_BELANJA_MODAL

Atmoko, C. A., & Khairudin. (2022). Dampak Pendapatan Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, 9(2), 112–126. file:///C:/Users/multi/Downloads/kelola,+09+-+JIAKES+2022+Vol+10+No+2+-+1295+Carlos.pdf

Dick-Sagoe, C., Tingum, E. N., Asare-Nuamah, P., Yuni, D. N., & Baidoo, N. (2025). *Central transfers and incentives to collect local revenue among the Central Region of Ghana's local government officials: Analysing the flypaper effect. Local Government Studies*, 51(1), 1–24. Central transfers and incentives to collect local revenue among the Central Region of Ghana's local government officials: analysing the flypaper effect

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2016–2024). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Kementerian Keuangan RI. https://djpk.kemenkeu.go.id

Eljawati & Nurafdaliana. (2022). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JEKP/article/view/2784

Fahriza, M. & Riswati, R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3732

Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.

Hartati, Sri. (2021). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah dalam Mendukung Pembangunan Inklusif: Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 8(1), 1–18.

https://link.springer.com/article/10.1007/s43621-025-01308-4

Lewis, B.D. Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law, Bulletin of Indonesian Economic Studies (Taylor & Francis). https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00074918.2023.2180838

Nisa, A., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2012–2018. Diponegoro Journal of Economics, 10(1), 1–14. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/29993

Niswani, N., Ikhyanuddin, Firdaus, R., & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh 2016–2020. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(2), 201–215.

Provinsi Riau. BPS Riau. https://riau.bps.go.id

Rahman, M. M., Dyuti, T. I., Tareque, M., & Alnour, M. (2025). *Health Expenditure, Governance and SDG3 Nexus: A Longitudinal Analysis in BRICS Economies. Social Indicators Research*, 168(2), 451–478. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11983840

Riswati, R. & Bukhori, Y. (2023) Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Bandung. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3200

Singla, A. & Stone, S.B. Fiscal Decentralization and Financial Condition, State and Local Government Review (Sage). https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0160323X18794014

Sudrajat, Ihwan . (2021). Investasi Publik Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Kajian atas Peran Belanja Modal dalam Pengurangan Disparitas Antarwilayah. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 7(3), 201–218.

Suratno & Soerjo, A.P. Effect of Government Investment and Capital Participation on Local Own-Source Revenue: The Case of Indonesia, European Research Studies Journal. https://ersj.eu/journal/1127

Tumija, T. dkk .(2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2806

Yeboah, S. D., Baboo, A. M., Fumey, M. P., Ansah, M. A., & Oduro, L. (2025). Role of Agricultural Finance and Investment in Reducing Rural Poverty in Ghana: Insights from Wavelet Coherence Analysis. Agricultural Finance Review, 85(1), 34–54.